

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

## WTP Bukan Tujuan Akhir

**INDOPOSCO** - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2022 bukan tujuan akhir.

“Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini, bukan tujuan akhir, namun bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah dilakukan pada 2022,” kata Heru setelah penyampaian LHP oleh BPK RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/5),

dikutip dari Antara.

Ia menyebutkan, terdapat enam bagian yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 2022.

Yakni, implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik, pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dan penetapan peraturan dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.

Kemudian, ada pelaksanaan ulasan (review) Laporan Keuangan dengan pendekatan berbasis resiko (risk based review), penguatan Sistem Pengendalian Internal

melalui pengawasan melekat Kepala Perangkat Daerah dan pendampingan oleh Inspektorat. Terakhir, melakukan percepatan tindak lanjut atas LHP BPK RI.

Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Anggota V BPK RI Ahmadi

Noor Supit.

Ini merupakan kali keenam Pemprov DKI Jakarta menyematkan predikat tersebut sejak tahun 2017.

Heru mempersembahkan opini WTP dari BPK RI atas LHP Tahun Anggaran 2022 untuk pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat Jakarta.

“Opini WTP ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ucap dia.

Heru juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemprov DKI atas standar kerja yang tinggi dan semangat yang dilakukan sehingga kembali mendapat opini WTP.(arm)